

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

YOSI DIANTRIANI

NPM : 1802110024



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 11 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

YOSI DIANTRIANI
NPM : 1802110024

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2020**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Pembimbing II

Rusnaldi, SE, M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 11 Februari 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

YOSI DIANTRIANI
NPM : 1802110024

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 09 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Rusnaldi, SE, M. Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota

Ermad M J, SE, M. Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 11 Februari 2022

Yang Menyatakan



Yosi Diantriani

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yosi Diantriani
NPM : 1802110024
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Yosi Diantriani
Yosi Diantriani

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh Tahun 2018-2020.”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya shalawat beserta salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang senantiasa berusaha memperbaiki akhlaq umat manusia menjadi insan yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan.

Meski tulisan ini telah dilakukan dengan maksimal, namun penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk membantu menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kemurahan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE,M.Si,MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Syamsidar, SE,M.Si,Ak. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE,M.Si,Ak,CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE,M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Bapak Dr. Aliamin SE, M.Si,Ak,CA. Selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rusnaldi, SE,M.Si Selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan arahan, wawasan dan pengetahuan kepada penulis dengan tulus hati.
8. Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama menjalankan kuliah hingga selesai.
9. Ayahanda Bunawan, Ibunda Mistri dan kakak Eahyuni Sari yang selalu memberikan do'a, dorongan, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat penulis Yesi Permatasari, Cindy Yola, Mifta Faradita, Habsah, Zuhrina. yang telah banyak membantu penulis.
11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan, wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, bagi penulis khususnya dan umumnya bagi yang membaca skripsi ini.

Banda Aceh, 3 Desember 2021

Yosi Diantriani

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan	9
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan	9
2.1.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan	10
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	11
2.1.3 Anggaran	13
2.1.3.1 Pengertian Anggaran.....	13
2.1.3.2 Jenis- Jenis Anggaran.....	14
2.1.3.3 Tujuan Anggaran.....	16
2.1.3Laporan Realisasi Anggaran Belanja	18
2.1.3.1 Pengertian Realisasi Anggaran Belanja	18
2.1.4.2 Tujuan Realisasi Anggaran	19
2.1.5 Efektivitas	19
2.1.5.1 Pengertian Efektivitas	19
2.1.5.2 Pengukuran Efektivitas	20
2.1.6 Efisiensi.....	21
2.1.6.1 Pengertian Efisiensi.....	21
2.1.6.2 Pengukuran Efisiensi.....	22
2.2 Penelitian Sebelumnya	24
2.3 Kerangka pemikiran	30
 BAB III. METODE PENELITIAN	 31
3.1 Desain Penelitian	31
3.1.1 Tujuan	31
3.1.2 Jenis Penelitian.....	31
3.1.3 Horizon Waktu	32
3.1.4 Unit Analisis.....	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32

3.3 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh	36
4.1.1 Sejarah BAPPEDA Kota Banda Aceh	36
4.1.2 Visi dan Misi BAPPEDA Kota Banda Aceh	36
4.1.3 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Banda Aceh	37
4.1.4 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Banda Aceh	38
4.2 Hasil Penelitian	38
4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pada BAPPEDA Kota Banda Aceh	38
4.2.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Pada BAPPEDA Kota Banda Aceh	40
4.3 Pembahasan	43
4.3.1 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja BAPPEDA Kota Banda Aceh ...	43
4.3.2 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pangan Aceh	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Laporan Ralisasi Anggaran Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2018-2020	5
1.2 Capaian Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2018-2020.....	6
2.1 Kriteria Rasio Efektivitas.....	21
2.2 Kriteria Rasio Efisiensi.....	23
2.3 Penelitian Sebelumnya	27
4.1 Kriteria Rasio Efektivitas.....	39
4.2 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2018-2020.....	39
4.3 Kriteria Rasio Efisiensi.....	41
4.4 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja BAPPEDA Kota Banda Aceh..... Tahun 2018-2020	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	30
4.1 Struktur Organisasi.....	38

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018-2020**

YOSI DIANTRIANI
NPM : 1802110024

**Pembimbing :1) Dr. Aliamin SE, M.Si,Ak,CA
2) Rusnaldi, SE,M.Si**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan anggaran dan belanja BAPPEDA Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) efektivitas anggaran dan belanja BAPPEDA Kota Banda Aceh tergolong efektif di tahun 2018 sebesar 94.39%, di tahun 2019 sebesar 92.72% dan di tahun 2020 sebesar 97.66% (2) efisiensi merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya efisiensi anggaran di BAPPEDA Kota Banda Aceh tergolong sangat efisien di tahun 2018 sebesar 49.79%, kemudian di tahun 2019 sebesar 46.43%, dan di tahun 2020 sebesar 35.90%

**Kata kunci : Efektivitas, Efisiensi, Anggaran dan Belanja, BAPPEDA Kota
Banda Aceh**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018-2020**

YOSI DIANTRIANI
NPM : 1802110024

**Pembimbing :1) Dr. Aliamin SE, M.Si,Ak,CA
2) Rusnaldi, SE,M.Si**

ABSTRACT

This study aims to determine the extent to which the effectiveness and spending on the budget efficiency Development Planning Agency (BAPPEDA) Banda Aceh City. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques, namely absorption. The data use is secondary data in the form of budget and expenditure financial report for BAPPEDA Banda Aceh city. The result showed that (1) the effectiveness of BAPPEDA budget and expenditure of Banda Aceh City was classified as effective in 2018 by 94.39%, in 2019 by 92.72% and in 2020 by 97.66%. (2) efficiency is a measure of the success of an activity which is assessed based on the size budget efficiency costs or resources at BAPPEDA Banda Aceh City are classified as year very efficient in 2018 at 49.79%, then in 2019 at 46.43%, and in 2020 at 35.90%.

**Keywords : Effectiveness, Efficiency, Budget and Expenditure, BAPPEDA
Banda Aceh City**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan yang paling mendasar dalam pemenuhan kebutuhan program setiap institusi atau unit kegiatan adalah ketersediaan anggaran yang kemudian disalurkan pada setiap sisi program yang disediakan atau program yang direncanakan. Pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu cara pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, penatausaha, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kesuksesan suatu otonomi daerah tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengelola keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa dana publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Anggaran merupakan rencana kegiatan yang di persentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Lembaga Negara atau instansi pemerintahan baik itu pusat dan daerah juga menyediakan penganggaran. Dalam pelaksanaan perencanaannya

diperlukan pengawasan disetiap instansi.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara menyatakan bahwa percepatan pelaksanaan anggaran dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan optimalisasi peran pendapatan dan belanja negara, khususnya pendapatan dan belanja Kementerian Negara/Lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai rujukan tentang penggunaan anggaran negara atau APBN.

Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik negara. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pengukuran efektivitas dan efisiensi anggaran atau keuangan dapat dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas dan efisiensi keuangan.

Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Sementara rasio efisiensi adalah rasio yang

menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan.(Halim, 2017)

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip yang transparan adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Secara umum, kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran selama ini adalah keterbatasan untuk mengembangkan instrumen teknis perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja, bukan pendekatan *incremental* yang sangat lemah landasan pertimbangannya (Sumenge,2016).

Oleh karenanya, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang jelas. Berkenaan dengan ini, maka penetapan standar kinerja proyek dan kegiatan serta harga satuannya, akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Sebelum anggaran disiapkan, organisasi seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi dimasa depan, umumnya mencakup setidaknya untuk lima tahun kedepan. Organisasi dapat menerjemahkan strategi umum ke dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan-tujuan ini membentuk dasar anggaran. Hubungan erat antara anggaran dan rencana strategi membantu manajemen untuk memastikan bahwa semua perhatian tidak terfokus pada operasional jangka pendek.

Perencanaan dalam anggaran sangat diperlukan karena dengan adanya perencanaan ini maka organisasi akan dapat mengendalikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan ataupun biaya sehingga tidak ada suatu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, itu menyebabkan proses penyusunan anggaran menjadi hal yang penting dalam sebuah proses perencanaan.

Suatu anggaran disusun untuk mencoba memperkirakan kejadian yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Proyeksi kedepan dan dijabarkan dalam betuk angka-angka sehingga

dibutuhkan pesiapann penyusunan anggaran yang matang, tajam, dan teliti. Penganggaran atau anggaran sangat penting bagi organisasi karena “penganggaran adalah perencanaan keuangan organisasi yang sekaligus dipakai dasar sistem pengendalian (pengawasan) keuangan organisasi untuk periode yang akan datang.

Pengertian efektivitas anggaran menurut Murni (2017:6) adalah tingkat pencapaian hasil program anggaran dengan target yang ditetapkan. Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam, tergantung dari pada sasaran atau tujuan yang ingun dicapai atau yang telah ditetapkan. Berdasarkan faktanya mengenai efektivitas dapat diketahui dari laporan realisasi anggaran Bappeda Kota Banda Aceh dari tahun 2018-2020 pada tabel berikut;

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2018-2020
(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2018	10.090.693.396	9.525.026.125	94.39%
2019	9.929.975.972	9.207.172.732	92.72%
2020	9.196.137.110	8.981.406.777	97.66%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan anggaran pada BAPPEDA Kota Banda Aceh dari tahun 2018 sampai 2020 kinerja keuangan yaitu anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 10.090.693.396 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.525.026.125 dan tingkat presentase 94.39%. Kemudian anggaran pada BAPPEDA Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sebesar Rp 9.929.975.972 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.207.172.732 dan tingkat presentase sebesar 92.72% artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa anggaran pada BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2020 sebesar 9.196.137.110 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.981.406.777 dan tingkat presentase sebesar 97.66 artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Dilihat pada tabel diatas anggaran pada dinas Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Banda Aceh memiliki tingkat yang efektif. dimana dampak dari itu sendiri sangat berguna bagi dinas tersebut diantaranya menunjukkan keberhasilan suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuan yang baik dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan.

Pengertian efisiensi menurut murni (2017:6) adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output*/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Berdasarkan faktanya mengenai efisiensi dapat diketahui dari target anggaran pada BAPPEDA Kota Banda Aceh tahun 2018-2020 pada tabel berikut;

Tabel 1.2
Anggaran Belanja Langsung BAPPEDA Belanja Kota Banda Aceh

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Presentase
2018	4.742.619.787	9.525.026.125	49.79%
2019	4.275.357.747	9.207.172.732	46.43%
2020	3.224.985.243	8.981.406.777	35.90%

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisien dari tiap tahun mengalami fluktuasi atau kenaikan penurunan tetapi tiap tahun tingkat efisiensi sudah mencapai target yaitu sebesar 49.79% di tahun 2018. Pada tahun 2019 presentase tingkat efisiensi sebesar 46.43%. Selanjutnya di tahun 2020 tingkat presentase sebesar 35.90%.

Masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Efektivitas dan Efisiensi anggaran Belanja pada BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2018-2020.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi semua elemen yang membutuhkan dan dijadikan masukan kepada Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis, terdapat beberapa manfaat hasil penelitian yang dapat diperoleh yaitu:

- a. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas, efisiensi dan anggaran belanja.
- b. Manfaat bagi penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan pembahasan pada penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh tahun 2018-2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya termasuk segala pengaruh yang berhubungan dengan anggaran. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu dan Sondakh, 2016).

Menurut Noerdiawan (2017:4) Akuntansi pemerintahan adalah pengaplikasian akuntansi di bidang keuangan pemerintahan yang khususnya pada tahapan pencatatan, pelaporan, dan pelaksanaan anggaran termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya pada suatu tingkat atau unit pemerintahan, baik itu bersifat sementara atau pun permanen.

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang

dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah .

2.1.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan sendiri memiliki standar tersendiri yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Permendagri No. 64 tahun 2013 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Tanjung (2018:20) yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran.
3. PSAP 03 Laporan Aliran Kas.
4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan.
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan.
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi.
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap.
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban.
10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan.
11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.
12. PSAP 12 Laporan Operasional.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan iktishar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Disebutkan unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemda dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemda. pendapatan dibagi menjadi 3 kategori:
 - a. Pendapatan asli daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
 - b. Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu:
 - a. Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak sevara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.
 - b. Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.

- c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemda terutama dimaksud untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi :
 - a. Sumber penerimaan daerah, yaitu :
 - Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu.
 - Penerimaan pinjaman dari obligasi.
 - Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
 - Transfer dari dana cadangan.
 - b. Sumber pengeluaran daerah, yaitu :
 - Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
 - Penyertaan modal.
 - Transfer ke dana cadangan.
 - Sisa lebih anggaran tahun sekarang.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 Laporan perubahan saldo anggaran menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang Menyusun laporan keuangan konsolidasi
3. Laporan Operasional.
 Laporan operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perusahaan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas.
 Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
5. Neraca.
 Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi asset, kewajiban dan kekayaan pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Berdasarkan SAP, neraca disusun dengan basis akrual, artinya pengakuan/pencatatan asset, kewajiban dan ekuitas dana dilakukan pada saat hak/kewajiban muncul, meskipun kas-nya belum diterima/dibayarkan. Format neraca dibangun dari suatu persamaan dasar akuntansi yaitu $\text{asset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas dana}$. Dengan demikian, total asset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana.

6. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diwajibkan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar

2.1.3 Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Anggaran

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Menurut Sasongko dan Parulian (2015) anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Kemudian menurut Nafarin (2016) Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu

organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

2.1.3.2 Jenis – Jenis Anggaran

Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan di dalam periode mendatang harus disusun di dalam suatu anggaran lengkap karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik walaupun anggaran yang harus disusun perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran.

Menurut Rudianto (2017:197) pada dasarnya anggaran perusahaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran yaitu :

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen wiraniaga. Di dalam kelompok anggaran ini biasanya terkandung pula ramalan tentang beberapa kondisi tertentu yang berada diluar kendali manajemen penjualan, misalnya, keadaan ekonomi nasional dan dunia, perubahan harga jual pesaing. Sehingga manajer pemasar tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab terhadap

pencapaian sasaran yang dianggarkan. Anggaran penjualan dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran.

b. Anggaran Biaya

Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam kelompok anggaran ini, dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner. Kelompok anggaran biaya ini dapat dipilah menjadi:

1. Anggaran biaya bahan baku adalah rencana besarnya biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang.
2. Anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah rencana besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi dalam suatu periode tertentu dimasa mendatang.
3. Anggaran biaya overhead adalah rencana besarnya biaya produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini mencakup anggaran biaya bahan penolong, anggaran biaya tenaga kerja penolong, anggaran biaya pabrikase, dll.
4. Anggaran biaya pemasaran adalah rencana tentang besarnya biaya distribusi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya. Anggaran biaya ini mencakup anggaran biaya iklan, biaya angkut penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, dll.
5. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah biaya yang direncanakan untuk operasi kantor administrasi di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran ini mencakup anggaran biaya listrik, air, telepon, gaji pegawai, biaya bunga, dll.

c. Anggaran Laba

Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Anggaran laba merupakan rangkuman dari ke seluruh anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Karena itu anggaran laba dapat digunakan untuk:

1. Mengalokasikan sumber daya.
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi.
3. Alat pengecek akhir tentang efisiensi dianggarkan.
4. Membagi tanggung jawab kepada semua manajer atas kinerja keuangan perusahaan atau divisi.

2. Anggaran keuangan

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan

secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini pendukung upaya untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan, anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu;

- a. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti: pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya.
- b. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.
- c. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang, berarti, dalam proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang.

2.1.3.3 Tujuan Anggaran

Berikut adalah tujuan-tujuan lainnya yang terkait dengan penyusunan anggaran menurut Sasongko dan Parulian (2018:23) :

1. Perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2019:19), antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- d. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Dari definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan di perusahaan.

Menurut Nafarin (2019:5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

1. Planning (Perencanaan)
Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang, termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.
2. Organizing (Pengorganisasian)
Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.
3. Actuating (Menggerakkan)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.
4. Controlling (Pengendalian)
Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Sasongko dan Parulian (2017:3) kelompok fungsi anggaran yaitu:

1. Perencanaan Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi Anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.

Dari beberapa fungsi anggaran menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan.

2.1.4 Laporan Realisasi Anggaran Belanja

2.1.4.1 Pengertian Realisasi Anggaran Belanja

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2010 menyatakan laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya menurut Wiratna (2016:57) mengatakan bahwa laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2019:122) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah suatu laporan yang menyajikan jumlah anggaran atau alokasi dana yang di terima dan di realisasi dalam pengelolaan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam satu periode tertentu.

2.1.4.2 Tujuan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas perubahan dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi berupa alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan (wira, 2016).

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2010 tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan.

2.1.5 Efektivitas

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Ruvianto (2019:11) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana organisasi menghasilkan keluaran sesuai dengan

yang diharapkan artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program semakin besar kontribusi output (hasil kerja) yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Adisasmita (2016:170) mendefinisikan efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Menurut Halim (2016:271) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan untuk belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Beberapa pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar target yang ditetapkan telah tercapai, sehingga mengindikasikan organisasi yang berdaya guna, dengan demikian efektivitas penggunaan belanja langsung menunjukkan seberapa besar target anggaran belanja langsung telah dicapai.

2.1.5.2 Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target pendapatan sektor publik. Tingkat efektivitas diukur dengan

cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Berikut rumus untuk mengukur tingkat anggaran belanja (Halim,2016)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 jika jumlah rasio efektivitas lebih besar dari 100% maka kemampuan keuangan dapat dikatakan sangat efektif. Selanjutnya ketika jumlah rasio efektivitas berkisar antara 90%-100% maka kemampuan keuangan dikatakan efektif. Jumlah rasio efektivitas berkisar antara 80%-90% maka kemampuan keuangan dikatakan cukup efektif. Dan jika rasio efektivitas berkisar antara 60% - 80% maka kemampuan keuangan dikatakan kurang efektif. Demikian juga jika rasio efektivitas <60% maka kemampuan dikatakan tidak efektif. Untuk kriteria rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

2.1.6 Efisiensi

2.1.6.1 Pengertian Efisiensi

Susilo (2017) menyatakan “efisiensi adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Menurut Lubis (2019), efisiensi ialah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai *ratio output* terhadap input.

Raharjo (2017:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara matematis efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input atau dengan istilah lain output per unit input. Sedangkan Mardiasmo (2019:98) efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan

untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien.

2.1.6.2 Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja (Halim, 2016). Berikut rumus untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi menurut Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 jika jumlah rasio efisiensi lebih besar dari 100% maka kemampuan keuangan dapat dikatakan tidak efisien. Selanjutnya ketika jumlah rasio berkisar antara 90% - 100% maka kemampuan keuangan dikatakan kurang efisien. Jumlah rasio efisiensi berkisar antara 80%-90% maka kemampuan dikatakan cukup efisiensi, demikian jika rasio efisiensi <60% maka kemampuan keuangan dikatakan sangat efisien. Untuk kriteria rasio efisiensi dapat dipilih pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Selain analisis rasio juga digunakan analisis varian dalam mengukur tingkat efisiensi penyerapan anggaran. Analisis varians (selisih) anggaran pendapatan, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam menganalisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan adalah:

- a. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun presentase.
- b. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
- c. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan.
- d. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Lazyra (2016), tentang Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Medan. Hasil penelitian menunjukkan pada rasio efektivitas pada tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2012 dan tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan. Tahun 2012 – 2015 secara berurutan sebesar 89.1%, 74.3%, 79.8% dan 88.6%. Pada rasio efisiensi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi di tahun 2012 mengalami penurunan. Besar nya rasio efisiensi dari tahun 2011-2015 secara berurutan sebesar 110.7% , 100.7% 98.4% dan 92.1%.

Penelitian yang dilakukan oleh Rampengan (2016) Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA kota manado tahun 2011-2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi

pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. Tingkat atau kriteria efisiensi badan pembangunan daerah (BAPPEDA) kota Manado tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik.

Kristiyanto dan Widodo (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur dalam Pengentasan Kemiskinan, dengan tujuan untuk menganalisis efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Selain itu terkait dengan masalah kemiskinan, hal ini dipandang sebagai suatu masalah yang bersifat multidimensional. Artinya, kemiskinan bukan hanya dimaknai dengan kekurangan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kemiskinan juga merupakan satu hal yang bersifat kultural. Jika ingin mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah maka harus dipertimbangkan mengenai pendekatan secara kultural pada masyarakat tersebut.

Selanjutnya Gerald (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran di badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan kabupaten minahasa utara dari tahun 2011-2015 sudah

dikategorikan sangat efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada laporan realisasi anggaran tersebut.

Kemudian Untari (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011 – 2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat bermanfaat semakin baik (*spending well*). Pencapaian belanja langsung dinas pendidikan kota semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011-2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Medan Lazyra (2016),	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukan pada rasio efektivitas pada tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2012 dan tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan. Tahun 2012 – 2015 secara berurutan sebesar 89.1%, 74.3%, 79.8% dan 88.6%. Pada rasio efisiensi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi di tahun 2012 mengalami penurunan. Besar nya rasio efisiensi dari tahun 2011-2015 secara berurutan sebesar 110.7% , 100.7% 98.4% dan 92.1%.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
2	Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Rampengan (2016)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA kota manado tahun 2011-2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012, 2013 yang dikatakan kurang efektif, tetapi pada tahun 2014 dan 2015 yang cukup efektif. Tingkat atau kriteria efisiensi badan pembangunan daerah (BAPPEDA) kota Manado tahun 2011-2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

2.1 Tabel Lanjutan

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			belanja tahun 2011, 2012, 2013, dan 2015 yang di kategorikan sangat efisien dan hanya tahun 2014 dikategorikan efisien.		
3	Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Kristiyanto dan Widodo (2017)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Selain itu terkait dengan masalah kemiskinan, hal ini dipandang sebagai suatu masalah yang bersifat multidimensional. Artinya, kemiskinan bukan hanya dimaknai dengan kekurangan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, namun kemiskinan juga merupakan satu hal yang bersifat kultural.	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
4	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Di BAPPEDA Penelitian Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Minahasa Utara. Gerald (2016)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas laporan realisasi anggaran di badan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

2.1 Tabel Lanjutan

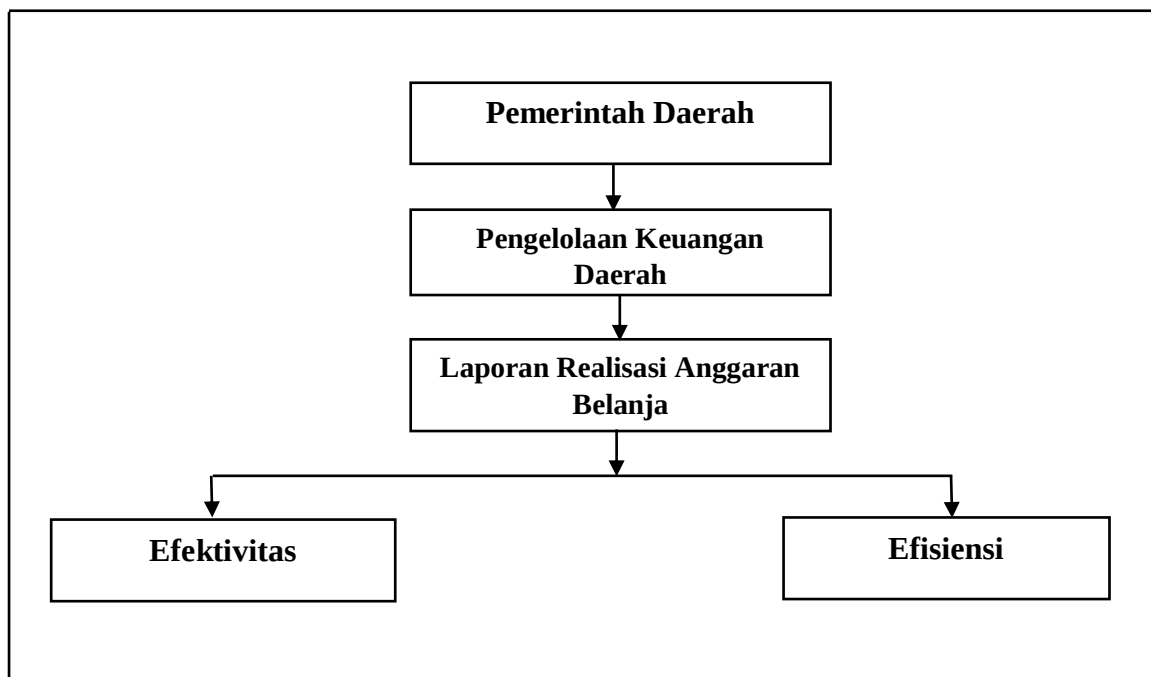
No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kabupaten minahasa utara dari tahun 2011-2015 sudah dikategorikan sangat efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada laporan realisasi anggaran tersebut.		
5	Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Untari (2016)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011 – 2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat bermanfaat semakin baik (<i>spending well</i>). Pencapaian belanja langsung dinas pendidikan kota semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011-2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut	Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. (Halim,2017)

Efisiensi berhubungan dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan prnggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*) (Halim,2017).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Halim,(2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari penelitian meliputi hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian analisis data, sedangkan struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam suatu penelitian. Desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu: tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu, dan unit analisis (Sekaran,2017).

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi laporan anggaran belanja pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh tahun 2018-2020.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil makna dari pada generalisasi

(Sugiyono,2018).

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran.

3.1.3 Horizon waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian *time series*, yaitu penelitian yang pengambilan datanya dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran.

3.1.4 Unit analisis

Peneliti membutuhkan laporan realisasi anggaran dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini, maka unit analisis yang digunakan pada tingkat instansi pemerintahan.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari tempat penelitian berupa wawancara langsung pejabat yang membuat laporan keuangan dan penanggung jawab

2. Data Sekunder

Merupakan sumber atau data yang diperoleh melalui pengumpulan data laporan realisasi anggaran belanja yang bersumber dari laporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa metode:

1. Observasi (pengamatan) adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap ojekt penelitian yang menggunakan sumber data sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif dan sistematis
2. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumentasi instansi, yakni dengan mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran belanja tahun 2018 sampai 2020.

3.3 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, Teknik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan ynag berlaku untuk umum (Sugiyono,2018).

Dalam hal ini yang dimaksud adalah menetapkan konsep perhitungan efektivitas dan efisiensi dan pengukuran pelaksanaan anggaran belanja, dengan menghitung perbandingan terget belanja dengan realisasi belanja yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh tahun 2018-2020.

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan. Analisis efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran (Halim, 2016).

Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efektivitas anggaran adalah :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, apabila perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran mencapai lebih dari 100% maka anggaran dapat dikatakan sangat efektif dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran dibawa 60% maka anggaran dikatakan tidak efektif. Dengan kata lain semakin besar tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat prsentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang di keluarkan untuk hasil yang diterima (Halim, 2016). Rumus yang digunakan untuk menghitung analisis efisiensi anggaran adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, apabila hasil perbandingan antara realisasi belanja langsung dengan realisasi anggaran mencapai kurang dari 60%, maka anggaran dapat dikatakan sangat efisien dan apabila hasil perbandingan antara realisasi anggaran di atas 100% maka anggaran dapat dikatakan tidak efisien.

Dengan kata lain semakin rendah tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan semakin efisien, begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat presentase perbandingan maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh

Seiring terbentuknya kota madya banda aceh tanggal 9 mei 1963 No.52/1/43-43 berdasarkan Keputusan Menteri Pemereintahan Umum dan Otonomi Daerah, maka pada tahun 1963 dibentuk juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota madya Banda Aceh. Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan bertepatan di jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Neusu Jaya

4.1.2 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh

1. Visi

Terwujudnya kota banda aceh yang gemilang dalam bingkai syariah.

2. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi BAPPEDA yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, ahlak, ibadah, muamalah dan syiar islam.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaanm kepemudaan dan olahraga.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.
4. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

4.1.3 Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

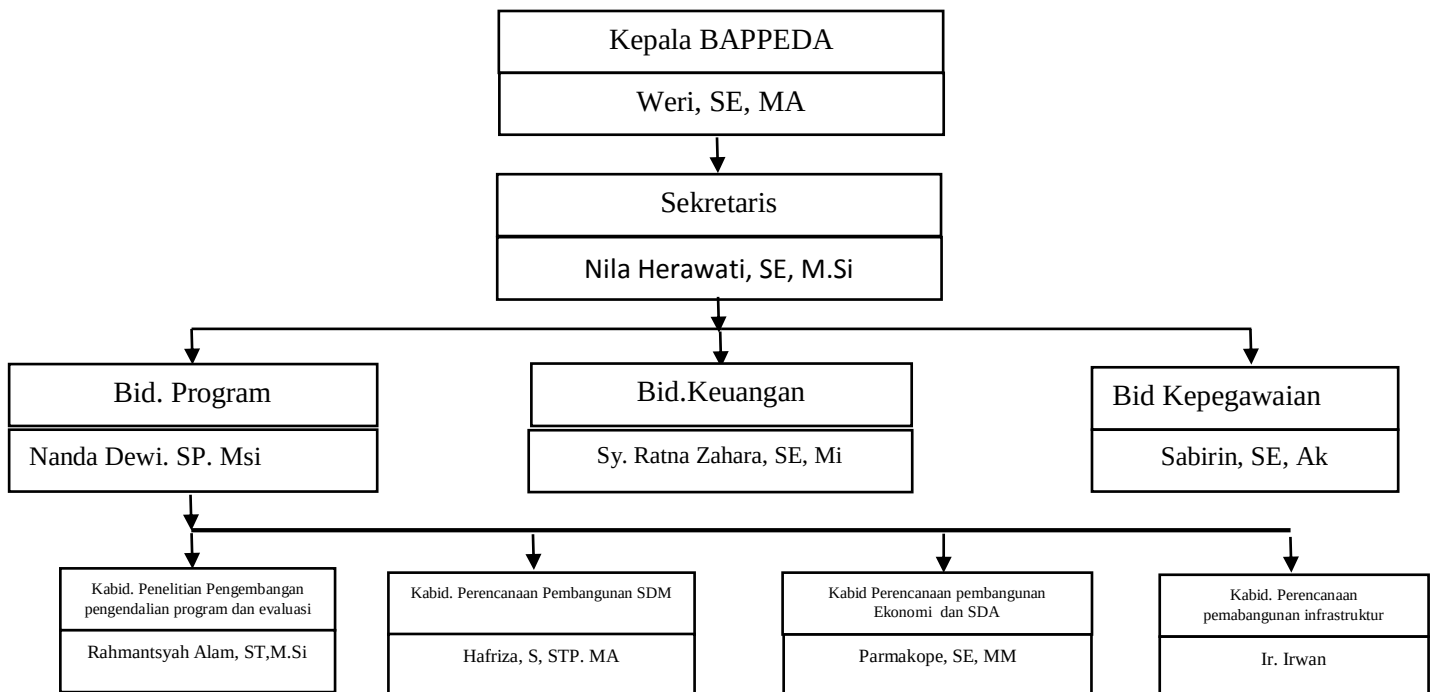
1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota banda aceh.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota banda aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh mempunyai wewenang:

1. Menyusun RPJPPD, RPJMD dan RKPD pemerintah Kota banda Aceh.
2. Melakukan pemeriksaan kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja SKPD).
3. Menyusun program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan kedalam program provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal kecamatan-kecamatan dan badan-badan lainnya yang berada dalam wilayah daerah kota banda aceh.
5. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (TAPD) dibawah koordinasi sekretaris daerah kota banda aceh.
6. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan rencana lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.

9. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk walikota.

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh



Sumber : <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh

Halim (2017) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan gambaran kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi real pemerintah. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi

anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jika rasio efektif 100% maka dinilai sangat efektif. Jika rasio dibawah 60% maka dinilai tidak efektif. Semakin besar rasio efektivitas artinya kinerja pemerintah semakin baik. Kriteria rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Adapun hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas Anggaran Belanja BAPPEDA Kota Banda Aceh Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2018	10.090.693.396	9.525.026.125	94.39%
2019	9.929.975.972	9.207.172.732	92.72%
2020	9.196.137.110	8.981.406.777	97.66%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA)

Efektivitas anggaran tahun 2018:

$$2018 = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 9.525.026.125}{\text{Rp } 10.090.693.396} \times 100\%$$

$$= 94.39\%$$

Pada tahun 2018 jumlah anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Banda Aceh sebesar Rp.10.090.693.396 dan realisasi anggaran Rp.9525.026.125 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 94.39 %.

Rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang baik.

Efektivitas anggaran tahun 2019 :

$$\begin{aligned}
 2019 &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.9.207.172.732}}{\text{Rp. 9.929.975.972}} \times 100\% \\
 &= 92.72\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 jumlah anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh sebesar Rp.9.929.975.972 dan realisasi anggaran Rp.9.207.172.732. Hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 92.72%. Rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang baik.

Efektivitas anggaran tahun 2020 :

$$\begin{aligned}
 2020 &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.8.981.406.777}}{\text{Rp.9.196.137.110}} \times 100\% \\
 &= 97.66\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Aceh sebesar Rp.9.196.137.110 dan realisasi anggaran Rp. 8.981.406.777. Hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 97.66%. Rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti kinerja

anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang baik.

4.2.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh

Pengukuran efisiensi anggaran belanja dilakukan dengan membagi biaya pengeluaran anggaran belanja tidak langsung dengan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinilai sangat efisien. Jika rasio di atas 100% maka dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi artinya kinerja pemerintah semakin baik. Kriteria rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Kriteria Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kemampuan Keuangan
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat dan dijabarkan di bawah ini

Tabel 4.4
Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Presentase
2018	4.742.619.787	9.525.026.125	49.79%
2019	4.275.357.747	9.207.172.732	46.43%
2020	3.224.985.243	8.981.406.777	35.90%

Sumber: data diolah, 2021

Efisiensi anggaran tahun 2018

$$\begin{aligned}
 2018 &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Biaya Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp.4.742.619.787}}{\text{Rp.9.525.026.125}} \times 100\% \\
 &= 49.79\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 perbandingan realisasi anggaran biaya langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh Rp.4.742.619.787 dengan realisasi anggaran Rp.9.525.026.125 menunjukkan rasio efisiensi sebesar 49.79% rasio efisiensi antara <60% dapat dikatakan sangat efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran BAPEDA Kota Banda Aceh pada tahun 2018 memiliki hasil yang sangat efisien.

Efisiensi anggaran tahun 2019

$$\begin{aligned}
 2019 &= \frac{\text{Realisasi Anggaran Biaya Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 4.275.357.747}}{\text{Rp. 9.207.172.732}} \times 100\% \\
 &= 46.43\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 perbandingan realisasi anggaran biaya langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Aceh Rp.4.275.357.747 dengan realisasi anggaran Rp.9.207.172.732 menunjukkan rasio efisiensi sebesar 46.43% rasio efisiensi antara <60% dapat dikatakan sangat efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh pada tahun 2019 memiliki hasil yang sangat efisien.

Efisiensi anggaran tahun 2020

$$2020 = \frac{\text{Realisasi Anggaran Biaya}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 3.224.985.243}}{\text{Rp. 8.981.406.777}} \times 100\%$$

$$= 35.90\%$$

Pada tahun 2020 perbandingan realisasi anggaran biaya langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh Rp. 3.224.985.243 dengan realisasi anggaran Rp. 8.981.406.777 menunjukkan rasio efisiensi sebesar 35.90% rasio efisiensi antara <60% dapat dikatakan sangat efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh pada tahun 2020 memiliki hasil yang sangat efisien.

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Efektivitas Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh

Efektivitas adalah keberhasilan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila organisasi telah berhasil menacapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Atau dengan kata lain efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keuangan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan organisasi yang semakin baik.

Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, sewaktu-waktu mengalami penurunan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah tercapai dari rencana yang ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan akibat dari keluaran (*output*) yaitu dalam pencapaian atau terlaksananya suatu program. Semakin besar output yang

dihasilkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh tingkat efektivitas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir cukup efektif.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dianalisis bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020), anggaran belanja dibandingkan dengan target anggaran belanja hasilnya efektif. Tahun 2018 tingkat efektivitasnya mencapai 94.39%. Kemudian pada tahun 2019 92.72%%. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 97.66%. Berdasarkan data diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh sudah baik dalam menggunakan dana, sehingga program dapat tercapai. Supaya tingkat anggaran belanja menjadi efektif, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar bidang-bidang yang bersangkutan dalam rangka pencapaian suatu program. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran belanja, supaya target atau rencana anggaran program yang akan digunakan dapat direalisasikan dengan maksimal.

Dilihat dari tingkat efektivitas anggaran belanja pada tahun 2018-2020 dimana menunjukan kriteria yang efektif, dampak dari itu sendiri sangat berguna bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh di masa yang akan datang, salah satunya menunjukkan keberhasilan suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuan yang baik dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, maupun batas waktu yang di targetkan.

4.1.2 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh

Pengukuran tingkat efisiensi suatu organisasi melalui rasio antara pemasukan dan pengeluaran. Seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi manajerial. Efisiensi alokasi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas normal. Sedangkan efisiensi manajerial atau teknis merupakan kemampuan menggunakan sumber daya input pada tingkat *output* tertentu. Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh , tingkat efisiensi dari anggaran belanja sudah sangat efisien.

Berdasarkan tabel 3.4 mengenai perbandingan tingkat efisiensi dalam kurun waktu 3 tahun (2018-2020) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh dapat dianalisis bahwa, selama kurun waktu 3 tahun, realisasi anggaran belanja langsung dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja hasilnya sangat efisien. Pada tahun 2018, tingkat efisiensinya mencapai 49.79%. Tahun 2019 46.43% yang memiliki hasil sangat efisien, kemudian pada tahun 2020 mencapai 35.90%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam mengalokasikan dana anggaran untuk belanja program sudah baik. Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanakan atau diwujudkan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh telah dapat menekan dan meminimalisir belanja daerah nya sehingga berdampak baik untuk BAPPEDA. Dimana dampak itu sendiri menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh telah mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh tergolong efektif. Rasio anggaran dari tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 94.39%, tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 92.72%, tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 99.98%. Dan tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 97.66%. Tingkat efektivitas anggaran setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, hal tersebut merupakan hal yang baik untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kota Banda Aceh.
2. Efisiensi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA). Rasio efisiensi anggaran dari tahun 2018 sebesar 49.79%, tahun 2019 sebesar 46.43% , tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2020 sebesar 35.90%. Tingkat efisiensi merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk kebaikan dan kemajuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh, Yaitu:

1. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh sudah baik, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sangat efektif untuk mengelola keuangan nya.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh harus tetap meningkatkan penerimaan daerah nya terutama penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, meskipun hasil yang telah dicapai sampai pada saat ini masih tergolong baik .
3. Tingkat efisien pengelolaan keuangan daerah sudah mencapai tingkatan yang sangat efektif, oleh karena itu pada tahun-tahun yang akan datang rasio efisien harus lebih di pertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2016). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- AnitaWidya (2019).”Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Ambiguitas Peran dan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi”. Padang: *ejournal.unp.ac.id*.
- ayuningtyas (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Gerald. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Minasah Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol.1. Manado.
- Halim dan Kusufi. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim. (2017). Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.2. Manado.
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang *Ketetapan Kriteria rasio*.
- Kristiyanto. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur. *Jurnal JIEP*. Vol.17 No. 1. Surabaya.
- Lubis. (2017). *Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau*. Pekanbaru.
- Lubis. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.3. Medan.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Peerbit Andi: Yogyakarta.
- Menthu dan Shondakh (2016). *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Murni. (2017). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Nafarin ,(2017) *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan*. BEFE, Yogyakarta
- Nafarin. (2019). Analisis Keuangan Pemerintah. *E-Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Jakarta.

- Narifin,M (2016). Penganggaran Perusahaan. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Noerdiwan (2017). “Analisis Efektivitas dan Efisiensi anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Kebumen” *Journal of Chemical Information and Modeling lib.STIE Putrabangsa ac.id*.
- Parulina (2016). Akuntansi Manajemen. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Pramudiana (2017). Analisis Laporan Kuangan Pemerintah Derah. Yogyakarta UPP STIM YKPN.
- Raharjo. (2017). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada badan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi*.
- Raka. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Bada Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.3. Manado.
- Rudianto (2017). “ Analisis Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawsi Utara”. *Journal EMBA: Jurnal Riset ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Ruvianto. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal politeknik darusalam Palembang*.
Salemba Empat.
Salemba Empat. Edisi 4.
- Sasongko (2015) Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

- Sasongko dan Parulian (2015). *Anggaran* . Jakarta : Salemba Empat.
- Sasongko dan Parulian (2017). *Akuntansi Keuangan Pemerintahan*. Jakarta :
- Sasongko dan Parulian (2018). *Anggaran Keuangan Pemerintah*. Jakarta :
- Sekaran, U (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumenge (2016). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susilo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Tanjung. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Untari. (2016). Analisis Efisiensi Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Semarang.
- Wira (2016)” Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan”. *Journal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Wiratna. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perternakan Jawa Barat. *Jurnal Riset Ekonomi*. Bandung.

